

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah tujuan pembangunan Indonesia. Banyak faktor-faktor yang menjadi indikator menilai kemajuan suatu negara, seperti tingkat kesejahteraan masyarakat, stabilitas politik, tingkat pendidikan, kesehatan, infrastruktur, inovasi, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi Aulia et al. (2024). Melalui alokasi belanja publik di berbagai sektor yang strategis seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pemerintah berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Untuk menunjang aktivitas ekonomi, diharapkan belanja pada sektor- sektor tersebut dapat menjadi investasi jangka panjang yang akan mendorong peningkatan sumber daya manusia dan kapasitas fisik wilayah.

Menurut Handayani et al. (2024) pembangunan seharusnya menunjukkan perubahan total pada masyarakat atau perubahan sistem sosial tanpa mengabaikan keberagaman dan kebutuhan dasar individu maupun kelompok untuk menuju kondisi kehidupan yang lebih baik secara materi maupun spiritual. Keberhasilan pembangunan suatu negara seringkali diukur dari pertumbuhan ekonominya, karena angka ini dianggap sebagai cerminan langsung dari peningkatan kesejahteraan warganya. Namun, memandang pembangunan hanya dari kacamata Produk Domestik Bruto (PDB) saja tentu tidak cukup. Aspek-aspek lain seperti kualitas pendidikan, jaminan kesehatan, ketersediaan infrastruktur, hingga stabilitas politik juga menjadi tolok ukur penting Aulia et al. (2024).

Perekonomian Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan dinamika yang sangat menarik. Sempat anjlok hingga -2,07 persen akibat hantaman pandemi Covid-19, ekonomi nasional perlahan bangkit dengan pertumbuhan 3,69 persen pada 2021, melesat ke 5,31 persen di tahun 2022, dan kemudian stabil di kisaran 5,05persen dan 5,03persen pada 2023 dan 2024 (BPS, 2024). Fluktuasi ini menjadi bukti nyata bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya

bergantung pada kondisi global, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif pemerintah merancang kebijakan fiskal, terutama dalam mengalokasikan belanja publik.

Belanja publik merupakan salah satu "senjata" utama pemerintah dalam kebijakan fiskal untuk mencapai berbagai tujuan, mulai dari mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, hingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Handayani et al. (2024). Ketika pemerintah mengalokasikan dana ke sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pada dasarnya pemerintah sedang melakukan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi negara Abdillah & Primitasari (2023). Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan multiplier effect, di mana satu pengeluaran pemerintah dapat memicu investasi swasta, membuka lapangan kerja baru, dan memperbaiki layanan publik yang pada akhirnya mendorong roda perekonomian daerah.

Dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul, belanja pendidikan memegang peranan kunci. Logikanya sederhana: alokasi anggaran yang lebih besar untuk pendidikan diharapkan dapat membuka akses sekolah yang lebih luas, meningkatkan mutu pengajaran, dan pada akhirnya mencetak generasi yang lebih cerdas dan produktif. Anggaran ini tidak hanya untuk operasional sekolah, tetapi juga untuk modernisasi fasilitas, pelatihan guru, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan tantangan zaman Nistor et al. (2018); Parui (2021). Dengan kata lain, belanja pendidikan adalah investasi pada modal manusia yang menjadi motor penggerak ekonomi.

Di sisi lain, belanja kesehatan adalah pilar yang tak kalah penting. Tenaga kerja yang sehat tentu lebih produktif. Oleh karena itu, pengeluaran di sektor kesehatan—baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun individu—secara langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional Hu & Wang (2024); Nurvita et al. (2022). Anggaran kesehatan yang memadai terbukti mampu meningkatkan angka harapan hidup dan menekan angka kematian, yang ujungnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Pembangunan SDM melalui pendidikan dan kesehatan harus ditopang oleh infrastruktur yang memadai. Tanpa jalan, jembatan, dan konektivitas yang baik, kegiatan ekonomi mulai dari produksi hingga distribusi akan terhambat. Namun, pembangunan infrastruktur di Indonesia menghadapi tantangan unik, yaitu biaya konstruksi yang berbeda-beda antarwilayah. Untuk mengukurnya, digunakan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Semakin tinggi nilai IKK di suatu daerah, semakin mahal biaya yang dibutuhkan untuk membangun disana Komariah et al. (2025). Akibatnya, daerah dengan IKK tinggi berisiko tertinggal dalam pembangunan fasilitas publik, yang pada akhirnya dapat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi regional Rahmadhani (2019).

Di samping itu, pembangunan infrastruktur tidak kalah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai memungkinkan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi berjalan lebih (Aulia et al., 2024). Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat hambatan pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). IKK membandingkan biaya konstruksi suatu wilayah dengan kota referensi, sehingga semakin tinggi nilai IKK, semakin mahal biaya pembangunan di wilayah tersebut Komariah et al. (2025). Nilai IKK yang tinggi mencerminkan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya lebih besar, sehingga daerah dengan IKK tinggi berisiko mengalami hambatan dalam penyediaan fasilitas publik. Kondisi ini pada akhirnya dapat memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah (Rahmadhani, 2019). Dengan demikian, memasukkan IKK dalam penelitian penting untuk memahami disparitas ekonomi daerah akibat perbedaan biaya konstruksi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh belanja pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Akinwale, (2021); Hu & Wang, (2024); Nistor et al., (2018). Namun, masih sedikit penelitian yang menggabungkan analisis belanja publik dengan Indeks Kemahalan Konstruksi sebagai variabel penting dalam menjelaskan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) yang ingin diisi dalam studi ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh belanja publik di sektor pendidikan, kesehatan, serta Indeks Kemahalan Konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi publik serta masukan praktis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan kontekstual.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1 Bagaimana pengaruh belanja publik di sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia tahun 2015-2024 ?
- 2 Bagaimana pengaruh belanja publik di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia tahun 2015-2024?
- 3 Bagaimana pengaruh kemahalan konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia tahun 2015-2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1 Menganalisis pengaruh belanja publik di sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.
- 2 Menganalisis pengaruh belanja publik di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.
- 3 Menganalisis pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian teoritis mengenai determinan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya terkait pengaruh belanja publik dan biaya pembangunan yang direpresentasikan melalui Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan masing-masing wilayah, terutama dalam konteks perbedaan biaya konstruksi dan karakteristik demografi antar daerah.

## **3. Manfaat Kebijakan**

Penelitian ini memberikan masukan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih kontekstual dan efisien, dengan mempertimbangkan aspek kemahalan konstruksi dan distribusi penduduk sebagai faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik dan Neoklasik**

Pemikiran awal mengenai pertumbuhan ekonomi banyak dipengaruhi oleh pandangan para ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus. Smith (1776) berpendapat bahwa peningkatan output suatu perekonomian terutama ditentukan oleh akumulasi modal, pembagian kerja, serta efisiensi penggunaan faktor produksi. Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi terjadi ketika investasi mampu memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Ricardo menambahkan bahwa ketersediaan sumber daya alam dapat menjadi faktor pembatas ekspansi ekonomi, sedangkan Malthus menyoroti bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat berpotensi menekan kemampuan produksi pangan. Walaupun teori klasik masih bersifat sederhana, gagasan utamanya menegaskan bahwa akumulasi modal dan peningkatan produktivitas merupakan fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Perkembangan teori selanjutnya melahirkan pendekatan neoklasik, khususnya model Solow-Swan (Solow, 1956), yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh penambahan modal fisik, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam jangka panjang, kemajuan teknologi dan peningkatan produktivitas total faktor menjadi penentu utama keberlanjutan pertumbuhan. Model ini juga membuka ruang bagi peran kebijakan publik, terutama belanja pemerintah yang mendorong investasi di sektor-sektor produktif. Lupu et al. (2018) menemukan bahwa pengeluaran publik pada sektor strategis dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di berbagai negara berkembang, sejalan dengan prediksi teori neoklasik.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori klasik dan neoklasik memberikan landasan bahwa belanja pemerintah pada pendidikan, kesehatan, dan

infrastruktur berperan sebagai instrumen peningkatan kapasitas produksi daerah. Investasi tersebut akan memperbaiki kualitas tenaga kerja serta memperkuat modal fisik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Perbedaan tingkat belanja publik dan biaya pembangunan antarprovinsi akan menciptakan variasi kemampuan daerah dalam meningkatkan produktivitas dan output. Dengan demikian, teori ini relevan untuk menjelaskan hubungan antara belanja kesehatan, belanja pendidikan, kemahalan konstruksi, dan pertumbuhan ekonomi.

### **2.1.2 Teori Modal Manusia (Human Capital Theory)**

Teori modal manusia menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai investasi yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Schultz (1961) menegaskan bahwa pengeluaran pada pendidikan bukan sekadar konsumsi, melainkan bentuk investasi yang menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Becker (1964) kemudian memperluas konsep ini dengan menyatakan bahwa individu yang memperoleh pendidikan, pelatihan, dan layanan kesehatan akan memiliki produktivitas lebih tinggi, sehingga berpotensi memperoleh pendapatan yang lebih besar dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam perspektif pembangunan, kualitas manusia merupakan faktor penentu daya saing wilayah. Tenaga kerja yang berpendidikan dan sehat cenderung lebih adaptif terhadap perubahan teknologi, mampu bekerja secara efisien, serta memiliki kapasitas inovasi yang lebih baik. Nistor et al. (2018) menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang. Sementara itu, Nurvita et al. (2022) membuktikan bahwa belanja publik pada sektor pendidikan dan kesehatan berkontribusi positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.

Belanja pendidikan memungkinkan peningkatan akses dan kualitas pembelajaran, penyediaan sarana pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pengajar. Dampak jangka panjangnya adalah tersedianya tenaga kerja terampil

yang mampu meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi. Di sisi lain, belanja kesehatan berperan menjaga kondisi fisik dan mental masyarakat agar tetap berada dalam usia produktif yang optimal. Hu & Wang (2024) menemukan bahwa pengeluaran kesehatan publik memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui peningkatan kualitas tenaga kerja.

Dalam konteks penelitian ini, teori modal manusia menjelaskan bahwa perbedaan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan antarprovinsi akan menghasilkan variasi kualitas sumber daya manusia. Variasi ini pada akhirnya memengaruhi kemampuan daerah dalam menghasilkan output ekonomi. Oleh karena itu, teori ini menjadi dasar utama untuk menjelaskan pengaruh belanja pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

### **2.1.3 Teori Infrastruktur dan Biaya Pembangunan (Todaro dan Rostow)**

Todaro & Smith (2015) menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui perbaikan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan. Salah satu faktor penting dalam mendorong pembangunan adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang baik akan menurunkan biaya distribusi, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi proses produksi. Oleh sebab itu, investasi infrastruktur menjadi komponen penting dalam strategi pembangunan daerah.

Rostow (1960) menjelaskan bahwa negara atau wilayah akan mengalami tahapan perkembangan ekonomi tertentu, dan untuk mencapai tahap pertumbuhan pesat diperlukan investasi besar dalam infrastruktur serta pembangunan sumber daya manusia. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, aktivitas ekonomi sulit berkembang dan daya tarik investasi menjadi rendah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dipandang sebagai prasyarat utama untuk mempercepat transformasi struktural perekonomian.



Di Indonesia, pembangunan infrastruktur menghadapi tantangan berupa perbedaan biaya konstruksi antarwilayah. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menggambarkan tingkat perbedaan biaya pembangunan di berbagai daerah. Komariah et al. (2025) menyatakan bahwa tingginya IKK dapat menjadi hambatan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur karena membutuhkan anggaran yang lebih besar. Kondisi ini berpotensi memperlambat penyediaan fasilitas publik dan menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tingginya IKK dapat mencerminkan meningkatnya aktivitas pembangunan. Yulianti Tri et al. (2020) menemukan bahwa di beberapa wilayah, kenaikan IKK berkorelasi dengan intensitas proyek infrastruktur yang lebih tinggi, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hubungan antara kemahalan konstruksi dan pertumbuhan ekonomi bersifat empiris dan perlu dianalisis lebih lanjut.

Dengan demikian, teori Todaro dan Rostow memberikan dasar konseptual bahwa infrastruktur merupakan pendorong utama pertumbuhan, sementara variasi biaya pembangunan antarwilayah dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam mempercepat pembangunan. Hal ini menjelaskan pentingnya memasukkan variabel kemahalan konstruksi dalam analisis pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **2.1.4 Teori Keynesian dan Multiplier Effect**

Teori Keynesian menekankan peran aktif pemerintah dalam menggerakkan perekonomian melalui kebijakan fiskal. Keynes berargumen bahwa peningkatan belanja pemerintah akan mendorong permintaan agregat, yang selanjutnya meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesempatan kerja. Salah satu konsep penting dalam teori ini adalah efek pengganda, yaitu kondisi di mana tambahan pengeluaran pemerintah menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang lebih besar dibandingkan nilai awal belanja tersebut.

Dalam praktiknya, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah. Parui (2021) menyatakan bahwa belanja pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang yang tingkat investasi swastanya masih terbatas. Chen et al. (2022) juga menemukan bahwa belanja publik di sektor sosial dan infrastruktur berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Belanja pendidikan memicu permintaan terhadap tenaga pendidik, pembangunan fasilitas sekolah, serta penyediaan sarana pembelajaran. Belanja kesehatan meningkatkan permintaan terhadap layanan medis, tenaga kesehatan, dan infrastruktur kesehatan. Sementara itu, belanja infrastruktur yang dipengaruhi tingkat kemahalan konstruksi mendorong aktivitas sektor konstruksi, industri bahan bangunan, dan jasa pendukung lainnya. Seluruh aktivitas ini menghasilkan efek berganda yang memperluas peredaran uang dalam perekonomian daerah.

Dalam penelitian ini, teori Keynesian menjelaskan bahwa variasi belanja pemerintah antarprovinsi akan menciptakan perbedaan besarnya efek pengganda terhadap perekonomian daerah. Semakin besar belanja publik yang dialokasikan secara produktif, semakin besar pula dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

### **2.1.5 Teori Ketimpangan Wilayah (Regional Disparity Theory)**

Myrdal (1957) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi cenderung berlangsung tidak merata antarwilayah. Daerah yang lebih maju akan menarik investasi, tenaga kerja berkualitas, dan fasilitas publik yang lebih baik, sehingga mengalami pertumbuhan lebih cepat. Fenomena ini menciptakan proses akumulatif, di mana wilayah maju semakin berkembang sementara wilayah tertinggal sulit mengejar ketertinggalannya.

Hirschman (1958) menambahkan bahwa pembangunan sering terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan tertentu yang diharapkan dapat menyebarkan dampak positif ke wilayah sekitarnya. Namun, dalam banyak kasus, dampak sebar lebih kecil dibandingkan dampak balik, sehingga kesenjangan antarwilayah tetap bertahan. Perbedaan kemampuan daerah dalam menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi salah satu faktor utama penyebab disparitas tersebut.

Dalam konteks Indonesia, variasi belanja publik dan tingkat kemahalan konstruksi antarprovinsi mencerminkan perbedaan kemampuan fiskal dan tantangan geografis yang dihadapi daerah. Rahmadhani (2019) menunjukkan bahwa daerah dengan biaya konstruksi tinggi menghadapi hambatan lebih besar dalam pembangunan infrastruktur, sehingga berpotensi mengalami pertumbuhan ekonomi lebih lambat dibandingkan daerah dengan biaya pembangunan lebih rendah.

Oleh karena itu, teori ketimpangan wilayah digunakan untuk menjelaskan bahwa perbedaan belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan kemahalan konstruksi dapat menciptakan variasi kemampuan daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Teori ini memperkuat argumen bahwa analisis empiris diperlukan untuk memahami dinamika ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarprovinsi di Indonesia.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Hubungan Belanja Publik Kesehatan dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Konsep multiplier effect sangat ditekankan pada paham Keynesian, yang mengatakan bahwa jika ada peningkatan kecil pada pengeluaran pemerintah, akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih besar secara keseluruhan. Misalnya pada pengeluaran belanja publik kesehatan, berdasarkan teori ini peningkatan belanja kesehatan memiliki potensi untuk merangsang pertumbuhan

ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja serta pengurangan biaya kesehatan baik secara individu maupun kelompok Kamilah et al. (2024). Sehingga dalam jangka panjang peningkatan belanja kesehatan akan meningkatkan sumber daya manusia dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan temuan dari Christopher Nyong Ekong et al. (2024) yang menemukan bahwa peningkatan belanja kesehatan di Nigeria berdampak positif pada pertumbuhan inklusif. Temuan dari Tengilimo~ et al. (2022) menemukan bahwa peningkatan 1 persen pengeluaran kesehatan atau belanja kesehatan akan meningkatkan pendapatan perkapita sebesar 0,06 persen.

### **2.2.2 Hubungan Belanja Publik Pendidikan dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Hubungan antara belanja pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berbeda di setiap wilayah. Penelitian dari Mokumako et al. (2024) menemukan bahwa di negara-negara Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC) korelasi positif yang lemah hanya sebesar 0,46 yang menandakan bahwa kebijakan pendidikan tidak sesuai di negara-negara tersebut. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Paredes Mamani (2024) yang menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pendidikan sebesar 1 persen berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,12 persen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Anis (2023) yang melakukan penelitian pada 63 negara, hasil penelitiannya menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara pengeluaran publik untuk pendidikan dan pembangunan ekonomi.

### **2.2.3 Hubungan Kemahalan Konstruksi dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Kemahalan Konstruksi pada penelitian ini diukur dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah sebuah indikator yang dirancang untuk mengukur perbandingan tingkat harga atau biaya konstruksi di suatu daerah terhadap daerah rujukan, yang umumnya adalah rata-rata nasional Badan Pusat Statistik, (2023). Indeks ini secara inheren mencerminkan berbagai faktor lokal, termasuk kesulitan geografis dalam distribusi material dan intensitas kegiatan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.. Dalam kerangka teori ekonomi pembangunan, biaya konstruksi yang tinggi (IKK tinggi) dapat menjadi

hambatan bagi investasi infrastruktur: semakin mahal biaya bangunan, semakin berkurang insentif pemerintah dan swasta untuk membangun, sehingga potensi pertumbuhan ekonomi daerah bisa tertekan. Sebagai definisi, pertumbuhan ekonomi sendiri adalah proses kenaikan output riil suatu perekonomian dalam periode tertentu. Namun, IKK juga dapat mencerminkan tingginya aktivitas konstruksi – misalnya banyaknya proyek pembangunan – sehingga kenaikan IKK kadang diinterpretasikan sebagai indikator pembangunan yang intensif. Oleh karena itu, efek bersih IKK terhadap pertumbuhan ekonomi perlu diuji secara empiris.

Beberapa penelitian empiris di Indonesia menemukan bahwa IKK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Yulianti Tri et al. (2020) menemukan bahwa IKK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (koefisien positif dan signifikan). Artinya, peningkatan IKK terkait dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada periode 2013–2019. Hasil serupa dilaporkan dalam konteks Papua: Lidya et al. (2020) menunjukkan bahwa nilai koefisien IKK sebesar 0,0348 (positif) sehingga setiap kenaikan IKK 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua sebesar sekitar 0,034 persen. Dengan kata lain, IKK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di lima wilayah adat Provinsi Papua periode 2012–2016. Penelitian lain di wilayah eks-Karesidenan Surakarta oleh (Saputra, 2024) juga menemukan efek positif IKK, yaitu IKK berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB sektor konstruksi daerah tersebut. Meskipun fokus penelitian Saputra adalah output konstruksi (bukan total PDRB), temuan ini mendukung interpretasi bahwa tingginya IKK selaras dengan tingginya aktivitas konstruksi dan output ekonomi.

Secara keseluruhan, meskipun secara teoritis IKK yang tinggi berpotensi menghambat investasi, hasil-hasil penelitian di atas konsisten menunjukkan bahwa kenaikan IKK sering kali sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan IKK mungkin mencerminkan bertambahnya proyek pembangunan (dan permintaan bahan baku konstruksi),

sehingga mendorong output sektor konstruksi dan GDP daerah. Dengan demikian, hubungan empiris antara IKK dan pertumbuhan ekonomi daerah cenderung positif dan signifikan dalam studi-studi yang ada.

### **2.3 Tinjauan Empiris**

Chen et al. (2022) melaksanakan sebuah studi untuk mengkaji hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Vanuatu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah yang sumber dananya berasal dari pendapatan pajak justru memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, jika belanja pemerintah dibiayai oleh sumber lain seperti pendapatan non-pajak atau surplus/defisit anggaran, maka akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa alokasi belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, serta pembayaran gaji dan bunga pinjaman secara individual memiliki dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Hu & Wang (2024) melakukan riset mengenai dampak belanja kesehatan publik terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD. Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa belanja di sektor kesehatan publik akan secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi apabila kondisi ekonomi suatu negara ditandai dengan tingkat konsumsi rumah tangga, upah pekerja, dan investasi modal fisik yang lebih tinggi. Ketika tingkat konsumsi, upah, dan investasi modal fisik berada di bawah ambang batas tertentu, pengaruh belanja kesehatan publik terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung negatif. Namun, pengaruhnya berubah menjadi positif secara signifikan saat ketiga faktor tersebut melampaui nilai ambang batasnya.

Aulia et al. (2024) meneliti tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Indonesia dipengaruhi oleh belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan belanja modal. Studi ini menyimpulkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dua variabel lainnya, yaitu belanja kesehatan dan belanja pendidikan, ditemukan

tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah yang diteliti.

Gamon (2022) melakukan penelitian untuk menganalisis dan mengeksplorasi korelasi serta pengaruh antara belanja pemerintah di sektor pendidikan, belanja kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi di Hungaria. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan belanja pemerintah untuk pendidikan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dengan belanja kesehatan saat ini.

Ginting (2018) mengadakan penelitian kuantitatif untuk menganalisis pengaruh peningkatan belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di kabupaten dan kota di Provinsi Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah belanja pemerintah daerah pada sektor pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara itu, belanja pemerintah daerah untuk kesehatan, meskipun berpengaruh positif, namun tidak signifikan.

Iheanyi Anochiwa et al. (2019) melakukan analisis untuk memodelkan efek dari belanja layanan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Temuan dari penelitian ini adalah adanya hubungan simultan antara hasil kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Hasilnya juga menunjukkan bahwa belanja kesehatan signifikan dalam menentukan hasil kesehatan tetapi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi.

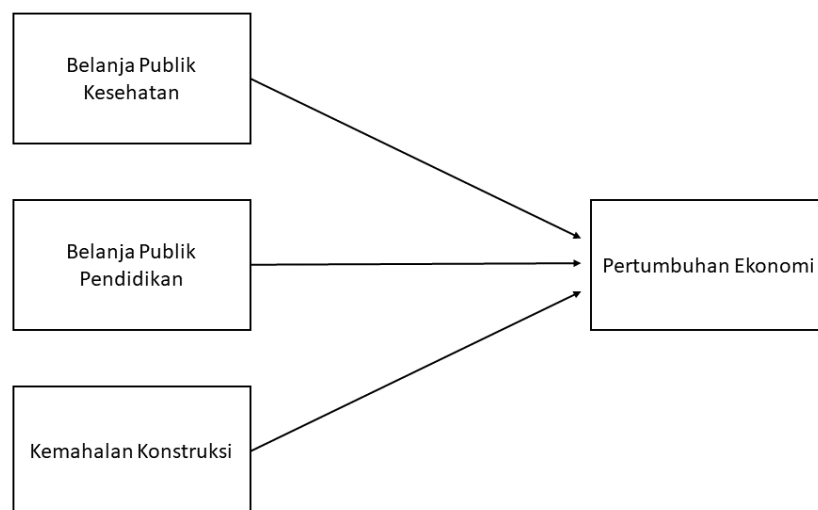
Sarah E Simamora et al. (2024) melaksanakan studi yang bertujuan untuk menganalisis dampak belanja pemerintah di sektor kesehatan dan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan belanja infrastruktur memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.

## 2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah kerangka yang menggambarkan keterkaitan teori-teori dan konsep pada tinjauan empiris yang mendukung penelitian ini. Secara konseptual penelitian ini mengasumsikan bahwa belanja publik kesehatan, belanja publik pendidikan dan indeks kemahalan konstruksi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas dan untuk mempermudah penelitian, maka dibentuklah kerangka pikir sebagai berikut :

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Untuk melakukan analisis tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia diajukan



**Gambar 1 Kerangka Pikir**

hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Diduga belanja kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Diduga kemahalan konstruksi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.